

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Indeks Gini

Indeks Gini, Rasio Gini, atau Koefisien Gini merupakan ukuran ketimpangan agregat yang pertama kali dikembangkan oleh statistik Italia bernama Corrado Gini dan dipublikasikan pada tahun 1912 (*International NGO Forum on Indonesia Development*, 2018). Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Indeks Gini dinyatakan dalam angka yang bernilai 0 sampai 1. Jika Indeks Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna (Todaro dan Smith, 2006).

Menurut Badan Pusat Statistik, Indeks Gini didasarkan pada Kurva Lorenz, yakni sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Indeks Gini membantu pemerintah dalam menganalisis tingkat kemampuan ekonomi masyarakat karena menjadi indikator derajat keadilan dalam suatu negara. Rumus menghitung nilai Rasio Gini atau Indeks Gini menurut BPS (2017) adalah sebagai berikut.

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n f_{pi} \times (F_{Ci} + F_{Ci-1})$$

Keterangan:

GR = Koefisien Gini

f_{pi} = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

F_{C_i} = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas
pengeluaran ke-i

$F_{C_{i-1}}$ = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas
pengeluaran ke (i - 1).

Menurut Oshima (1976), berikut adalah arti nilai dari besaran Rasio Gini:

$G < 0,3$ ————— artinya ketimpangan rendah

$0,3 \leq G \leq 0,5$ ————— artinya ketimpangan sedang

$G > 0,5$ ————— artinya ketimpangan tinggi

Selain Indeks Gini, disparitas pendapatan antar daerah bisa diukur dengan menggunakan Indeks Williamson. Indeks ini dikembangkan oleh Jeffrey G. Williamson pada tahun 1965. Williamson meneliti hubungan disparitas daerah dengan tingkat pembangunan ekonomi. Formula Indeks Williamson bisa dituliskan sebagai berikut:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (r_i - \bar{r})^2 \frac{x_i}{n}}}{\bar{r}}$$

Keterangan: r_i = PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di daerah i

\bar{r} = rata-rata PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di daerah

x_i = jumlah penduduk di daerah i

n = jumlah penduduk daerah keseluruhan.

Kriteria Indeks Williamson menurut Permendagri No. 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Jika $IW < 0,5 \rightarrow$ Ketimpangan rendah.
 Jika $IW \geq 0,5 \rightarrow$ Ketimpangan tinggi.

Walaupun dalam kenyataannya masih terdapat banyak pertimbangan untuk menyatakan pemerataan tingkat pendapatan masyarakat, Indeks Gini menjadi salah satu ukuran yang memenuhi empat kriteria, yaitu prinsip anonimitas (tidak memandang siapa yang dihitung apakah kaya atau miskin), prinsip independensi skala (tidak bergantung pada perekonomian suatu negara), prinsip independensi populasi (tidak bergantung jumlah penduduk), serta prinsip transfer (mengasumsikan semua pendapatan yang lain konstan). Berdasarkan penjabaran tersebut, maka Indeks Gini valid untuk digunakan sebagai alat ukur ketimpangan yang umum digunakan.

Alesina dan Rodrik (1994) menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan akan menghambat pertumbuhan. Hal ini karena ketimpangan menyebabkan kebijakan redistribusi pendapatan yang mahal. Faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan pendapatan sudah diteliti sebelumnya. Namun belum jelas apakah faktor yang benar-benar berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan sebab sampai sekarang ketidakmerataan pendapatan masih terus terjadi.

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto

Pertumbuhan ekonomi adalah berkembangnya aktivitas-aktivitas di dalam suatu perekonomian yang menjadikan produksi barang dan jasa di masyarakat

bertambah dan kesejahteraan masyarakat naik (Sukirno, 2000). Jika ingin melihat tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada satu periode tertentu dapat dilakukan dengan mengambil data laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Definisi PDRB yaitu jumlah nilai tambah dari seluruh unit usaha pada suatu waktu tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. Secara konseptual, perhitungan PDRB dapat menggunakan tiga macam proksi, yakni pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan.

PDRB dapat dilihat berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. Menurut Bank Indonesia (2015), PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PDRB ADHB dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB ADHK bisa menunjukkan pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Laju pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat diukur dengan menggunakan PDRB ADHK. Rumus untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi menurut Sukirno (2007) adalah sebagai berikut:

$$G = \frac{PDRB_1 - PDRB_0}{PDRB_0} \times 100\%$$

Keterangan: G = laju pertumbuhan ekonomi
 PDRB₁ = PDRB ADHK tahun tertentu
 PDRB₀ = PDRB ADHK pada tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan produk domestik regional bruto per kapita (Zaris, 1987). Menurut Afrizal (2013) semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah menunjukkan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi dan menggambarkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Pada hakikatnya, pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat terjadi ketika penentu-penentu endogen (faktor dari dalam daerah) maupun eksogen (faktor dari luar daerah) bersangkutan serta berkombinasi.

Menurut penelitian Sholihah (2013) pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini sesuai dengan teori Kuznets bahwa terdapat korelasi yang positif antara pendapatan per kapita dan ketimpangan pendapatan dalam jangka pendek.

2.1.3 Inflasi

Menurut Bank Indonesia (2018), inflasi diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Indikator inflasi berdasarkan *international best practice* di antaranya Indeks Harga Perdagangan Besar

(IHPB), Indeks Harga Produsen (IHP), Deflator Produk Domestik Bruto, dan Indeks Harga Aset. Rumus inflasi yang dihitung menggunakan IHK adalah sebagai berikut.

$$\text{Inflasi} = \frac{\text{IHK}_n - \text{IHK}_{n-1}}{\text{IHK}_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan: IHK_n = Indeks Harga Konsumen tahun dasar

IHK_{n-1} = Indeks Harga Konsumen tahun sebelumnya.

Menurut Boediono (1992) berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dikelompokkan menjadi empat tingkat, yaitu:

- a. Inflasi ringan (di bawah 10 persen per tahun),
- b. Inflasi sedang (antara 10 – 30 persen per tahun),
- c. Inflasi berat (antara 30 – 100 persen per tahun),
- d. Hiperinflasi (di atas 100 persen per tahun).

Inflasi memiliki dampak negatif atau positif tergantung dari tinggi rendahnya inflasi (Rahmah, 2010). Apabila inflasi itu rendah, hal ini justru dapat mendorong perekonomian melalui peningkatan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah atau tidak terkendali, uang menjadi tidak ada artinya dan perekonomian menjadi kacau atau mengalami kelesuan. Orang-orang tidak bersemangat untuk bekerja, menabung, bahkan mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat. Kelas berpendapatan rendah serta pengangguran merasakan dampak yang paling besar dan kewalahan menanggung kenaikan harga sehingga

hidup mereka semakin sulit. Hal inilah yang menjadi pemicu ketimpangan yang semakin melebar.

2.1.4 Dummy Dana Desa

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Kementerian Keuangan RI, 2017).

Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang dianggarkan setiap tahun dalam APBN dan ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Dana tersebut digunakan membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN.

Dana desa yang ditentukan 10 persen dari dan di luar dana transfer daerah dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan kepada setiap desa secara merata dan berkeadilan dengan memerhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana ini diberikan kepada desa dengan

pembagian 90 persen porsi yang dibagi rata (alokasi dasar) dan 10 persen dari porsi berdasarkan formula (alokasi formula).

Penggunaan dana desa pada dasarnya merupakan hak pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun, dalam rangka mengawal dan memastikan pencapaian sasaran pembangunan desa, pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahunnya.

Dana desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak untuk desa dalam rangka terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan desa secara merata dan dapat menurunkan tingkat kemiskinan yang tinggi di desa. Melalui hal tersebut, ketimpangan pendapatan yang terjadi di suatu daerah juga diharapkan akan semakin mengecil.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Agusalim (2016) menguji pengaruh variabel independen pertumbuhan ekonomi dan variabel *dummy* desentralisasi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Peneliti menggunakan alat analisis ekonometrika *time series* dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Gini (indikator ketimpangan pendapatan) sebelum

desentralisasi yang berarti bahwa adanya pertumbuhan ekonomi akan menurunkan ketimpangan. Setelah diterapkan desentralisasi, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan yang mengindikasikan bahwa jika ada kenaikan pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatannya justru melebar.

Selanjutnya penelitian Sulaiman *et al.* (2017) dilakukan untuk mengetahui hubungan jangka panjang antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Peneliti menambahkan variabel *foreign direct investment, trade openness*, dan pendidikan dalam hal ini *secondary enrolment* sebagai variabel-variabel independen selain pendapatan per kapita. Teknik yang digunakan adalah *Auto Regressive Distributive Lag (ARDL)*. ARDL digunakan untuk metode kointegrasi, mengetahui hubungan jangka panjang, dan *Error Correction Model (ECM)* untuk menguji ada tidaknya hubungan jangka pendek. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dalam jangka panjang dan berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dalam jangka pendek. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di Malaysia mendukung hipotesis Kuznets bahwa kenaikan mula-mula pada GDP per kapita akan meningkatkan ketimpangan pendapatan. *Secondary enrolment* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dalam jangka panjang maupun jangka pendek yang berarti pendidikan akan menurunkan

ketimpangan. *Foreign Direct Investment* (FDI) berpengaruh negatif signifikan pada jangka panjang dan berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dalam jangka pendek. *Trade openness* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dalam jangka panjang, namun negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dalam jangka pendek.

Penelitian Jaya (2017) mengenai Analisis Kausalitas antara Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui penggunaan variabel Indeks Gini dan pertumbuhan ekonomi dengan proksi berupa pertumbuhan PDRB tiap kabupaten/kota. Data panel terdiri dari data *time series* tahun 2011 – 2015 dan data *cross section* lima kabupaten/kota di Provinsi DIY. Metodenya adalah analisis *Vector Autoregression* (VAR). Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan satu arah (*unidirectional granger causality*) di antara variabel yang diteliti yaitu variabel pertumbuhan ekonomi terhadap variabel Indeks Gini. Jadi apabila pertumbuhan ekonomi mengalami perubahan, maka Indeks Gini akan mendapatkan pengaruh dari perubahan tersebut.

Skripsi Nawir (2018) dengan judul Determinan dari Ketimpangan Pendapatan Provinsi di Indonesia membahas tentang perkembangan Indeks Gini dan pengaruh variabel-variabel independen seperti kemiskinan, pendapatan per kapita, lama sekolah, pertumbuhan penduduk dan keterbukaan perdagangan. Penelitian dilakukan dengan mengambil data 33 provinsi di Indonesia dari tahun 2010 – 2015. Metode analisis dan pengolahan data menggunakan analisis deskriptif, analisis kuadran serta analisis regresi data panel. Rasio Gini relatif stagnan dan hanya turun ke angka 0,40

pada tahun 2016 dari sebelumnya 0,41 pada tahun 2010 – 2015. Rasio Gini menunjukkan tren yang cenderung meningkat pada tahun 1996 – 2016. Hal ini membuktikan bahwa ketimpangan pendapatan di Indonesia masih berada di angka yang tinggi hingga sekarang. GDP per kapita dan keterbukaan perdagangan berpengaruh positif terhadap ketimpangan. Kemiskinan, lama sekolah, dan pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan 33 provinsi di Indonesia.

Penelitian Yusica *et al.* (2018) berjudul Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Antar Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Peneliti menggunakan analisis regresi data panel dari tahun 2007 – 2015 di 10 kabupaten/kota. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah, sedangkan variabel tingkat pengangguran dan aglomerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur.

Determinan ketimpangan pendapatan di Provinsi Bali diteliti oleh Trimurti *et al.* (2018). Data sekunder diambil dari Badan Pusat Statistik dari tahun 2008 – 2017. Alat analisis yang digunakan adalah uji *logistic regression* pada data *time series*. Penelitian mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, penanaman modal asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan modal manusia tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

Analisis mengenai kausalitas inflasi, ketimpangan pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga pernah diteliti oleh Ihsan *et al.* (2018). Data yang digunakan diambil dari tahun 1986 – 2016. Pendekatan yang peneliti gunakan adalah *Vector Error Correction Model* (VECM) dan uji Kausalitas Granger. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tidak ada kausalitas antara inflasi terhadap ketimpangan pendapatan, tidak ada kausalitas antara inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi, dan terdapat kausalitas antara ketimpangan pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti bahwa terdapat hubungan searah antara ketimpangan pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Rahmah (2010) meneliti dampak laju inflasi terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Indonesia tahun 1976 – 2008. Data yang digunakan adalah Koefisien Gini kota, Koefisien Gini desa, Koefisien Gini Indonesia, distribusi pendapatan dalam kelompok 40 persen penduduk berpendapatan terendah, kelompok 40 persen penduduk berpendapatan menengah, kelompok 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi, persentase kemiskinan kota, persentase kemiskinan desa, persentase kemiskinan Indonesia, laju inflasi, tingkat pengangguran terbuka, dan Upah Minimum Regional (UMR). Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi tunggal dan berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa kenaikan laju inflasi berpengaruh pada peningkatan pengeluaran 40 persen penduduk berpendapatan terendah dan penurunan pengeluaran 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi. Kenaikan laju inflasi waktu lalu berpengaruh terhadap peningkatan pengeluaran 40 persen penduduk berpendapatan menengah dan penurunan angka Koefisien Gini di

Indonesia terutama di pedesaan. Kenaikan laju inflasi akan memperparah tingkat kemiskinan baik kota maupun desa. Kenaikan laju inflasi waktu lalu akan meningkatkan persentase kemiskinan di desa. Kenaikan pengangguran waktu lalu berpengaruh pada peningkatan angka Koefisien Gini Indonesia dan peningkatan pengeluaran 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi. Pertumbuhan UMR berpengaruh pada penurunan pengeluaran 40 persen penduduk berpendapatan menengah.

Chrisamba dan Saraswati (2016) menganalisis ketimpangan distribusi pendapatan 33 provinsi di Indonesia. Peneliti menggunakan data panel dengan tahun penelitian 2007 – 2012. Hasil *Fixed Effect Model* (FEM) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah juga dianalisis oleh Susilo (2018). Peneliti menggunakan data sekunder 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah data panel dengan pendekatan efek tetap (*Fixed Effect*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Indeks pembangunan manusia dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan, sedangkan upah minimum regional dan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 – 2015.

Penelitian Adam (2018) tentang ketimpangan pendapatan menggunakan variabel dana desa dan transfer fiskal dengan melakukan studi komparatif pada kabupaten/kota 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) dan non 3T Papua Barat pada tahun 2011 – 2016. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dan ekonometrika data panel. Hasil studi menunjukkan bahwa sistem distribusi dana desa dan transfer fiskal tidak menjamin wilayah dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi juga mendapatkan kedua anggaran tersebut relatif tinggi. Sementara hasil analisis ekonometrik menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh anggaran dana desa dan transfer fiskal antara wilayah 3T dengan wilayah non 3T. Penyaluran dana desa dapat memperkecil ketimpangan pendapatan di wilayah non 3T, namun tidak demikian di wilayah 3T. Sebaliknya dengan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai transfer fiskal, penyaluran DAU berpengaruh signifikan dan negatif di wilayah 3T dan berpengaruh signifikan dan positif di wilayah non 3T.

2.3 Hipotesis

1. Diduga laju pertumbuhan PDRB berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan 34 provinsi di Indonesia tahun 2011 – 2018.
2. Diduga inflasi daerah berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan 34 provinsi di Indonesia tahun 2011 – 2018.
3. Diduga *dummy* dana desa berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan 34 provinsi di Indonesia tahun 2011 – 2018.